

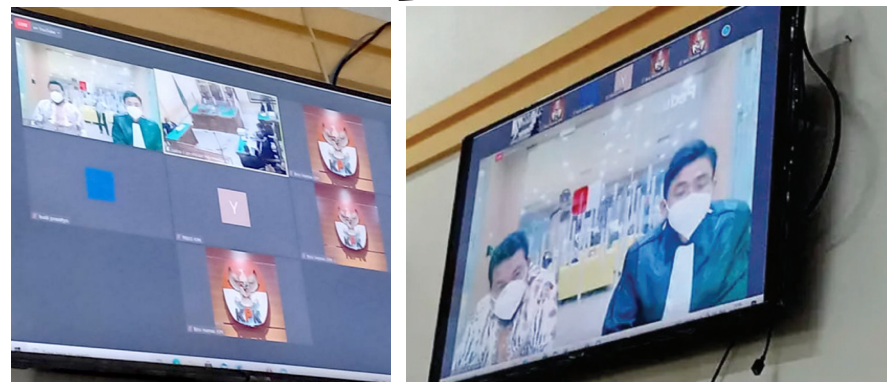
KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN PEMKO TANJUNGBALAI

Syahrial Dituntut 3 Tahun Penjara



Wali Kota nonaktif Tanjungbalai Muhammad Syahrial dengan baju tahanan KPK. (Foto dok)

Persidangan yang berlangsung virtual dalam agenda pembacaan tuntutan terhadap Wali Kota nonaktif Tanjungbalai. (Mimbar/A-08 - liputan6)



Medan, MIMBAR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Wali Kota nonaktif Tanjungbalai Muhammad Syahrial selama tiga tahun penjara, pada persidangan yang berlangsung virtual dari Ruang Cakra III, Pengadilan Tipikor Medan, Senin (30/8).

Pasalnya, terdakwa Muhammad Syahrial dinilai terbukti memberikan suap sebesar Rp1,6 Miliar ke Penyidik KPK Stepanus Robinson. JPU Budi juga meminta selain tuntutan penjara agar terdakwa membayar denda sebesar Rp150 juta dengan subsidair 6 bulan kurungan.

"Perbuatan terdakwa Muhammad Syahrial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b dan a serta Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peruba-

han Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana," kata JPU Budi dihadapan Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menguraikan, bahwa Syahrial meminta kepada Stepanus Robinson agar tidak menaikkan kasus perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK. Permintaan tersebut bertujuan agar proses Pilkada periode kedua tahun 2021-2026 yang akan diikuti tidak bermasalah.

■ Bersambung ke Hal 11



Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang juga Anggota DPR RI, Hasan Aminuddin tiba di gedung KPK. (Foto Tribunews)

KPK OTT Bupati Probolinggo dan Anggota DPR

Jakarta, MIMBAR - KPK mengamankan sejumlah uang dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan seorang Anggota DPR dari Fraksi NasDem Hasan Aminuddin.

■ Bersambung ke Hal 11

UPDATE COVID-19

INDONESIA	SUMUT
Positif	Positif
4.079.267	94.509
Sembuh	Sembuh
3.743.716	69.940
Meninggal	Meninggal
132.491	2.295

Update Terakhir: 30-08-2021

Data Terakhir: 30-08-2021

30 AGUSTUS: Tes dan Kasus Turun, Kematian Naik

Jakarta, MIMBAR - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali memperbarui data situasi COVID-19 di Indonesia pada Senin (30/8). Hari ini, terdapat 5.436 kasus konfirmasi yang dilaporkan. Menurun dari kemarin, 7.247 kasus pada Minggu (29/8).

■ Bersambung ke Hal 11

Pengadilan Tipikor Vonis Bebas Samin Tan



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Habib Rizieq Shihab dkk. Hasilnya, Habib Rizieq tetap divonis 4 tahun penjara terkait kasus swab RS Ummi Bogor.

Permohonan Banding Ditolak Habib Rizieq Tetap Divonis 4 Tahun Penjara

Jakarta, MIMBAR - Permohonan banding Habib Rizieq Shihab atas vonis 4 tahun penjara dalam kasus swab RS Ummi Bogor ditolak oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

22 MUHARRAM 1443 H

Subuh : 05.03 WIB	Maghrib : 18.32 WIB
Zuhur : 12.26 WIB	Isya : 19.41 WIB
Ashar : 15.35 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

DPR Masih Belajar?

Oleh Dr A Rasyid, MA

TERNYATA hari ini di usia 76 tahun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belajar mendengar aspirasi rakyat. Jika demikian halnya, pantaslah aspirasi rakyat selama ini tidak terdengar dengan baik. Lalu apa yang dibuat DPR kita selama ini untuk rakyatnya? Sungguh naib, jika DPR lembaga perwakilan rakyat tetapi tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak berbuat untuk rakyat.

■ Bersambung ke Hal 11

SERANGAN ROKET HANTAM LINGKUNGAN DI DEKAT BANDARA INTERNASIONAL KABUL:



Penduduk setempat melihat kendaraan yang rusak akibat serangan roket di Kabul, Afghanistan, Senin (30/8). Roket menghantam lingkungan dekat bandara internasional Kabul pada hari Senin di tengah penarikan AS yang sedang berlangsung dari Afghanistan. (Foto AP)



Kadiskominfo Sumut Irman Oemar

Kasus Covid di Sumut Mulai Terkendali

Medan, MIMBAR - Kasus Penularan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) mulai terkendali. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus positif yang terus menurun dan kesembuhan yang terus meningkat kian waktu. Hal tersebut disampaikan Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Covid-19 Sumut Irman Oemar, Senin (30/8).

■ Bersambung ke Hal 11

Lang Dade

- Berat,tapi ringan!
- he..he..he..

Lili Lakukan Pelanggaran Berat, Dihukum Potong Gaji

Jakarta, MIMBAR - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar divonis terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat sehingga dijatuhi sanksi pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan. Lili terbukti melakukan 2 perbuatan yang menurut Dewan Pengawas (Dewas) KPK melanggar nilai esensial KPK. Apa saja?

"Menyalahgunakan pengaruh untuk

kepentingan pribadi dan berhubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK," ucap Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers, Senin (30/8/2021).

Perbuatan Lili ini berkaitan dengan M Syahrial selaku Bupati Tanjungbalai yang kala itu ternyata memiliki perkara di KPK. Begini rincian perbuatan Lili seperti disampaikan Wakil Ketua Dewas KPK Albertina Ho saat membacakan pertimbangan putusan: Awalnya M Syahrial saat aktif sebagai Wali Kota Tanjungbalai bertemu

dengan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK di pesawat dari Kualanamu ke Jakarta sekitar Februari-Maret 2020. Lantas, Lili menyampaikan ke Syahrial tentang saudaranya yang bernama Ruri Prihatini Lubis.

"Terperiksa (Lili Pintauli Siregar) menyampaikan kepada saksi M Syahrial ada saudaranya bernama saksi Ruri Prihatini Lubis yang pernah menjabat selaku Plt Direktur PDAM Tirta Kualo di Tanjungbalai yang belum dibayar uang jasa pengabdiannya oleh PDAM Tirta Kualo

■ Bersambung ke Hal 11



Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Foto: dok KPK)

CSIS: Parpol Sibuk Pilih Calon di Pemilu, tapi Reformasi Diri Mandek

Jakarta, MIMBAR - Peneliti senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengkritik budaya partai politik (parpol) sejak era reformasi tak kunjung berubah hingga saat ini, bahkan jelang Pemilu 2024. Menurutnya, parpol selalu sibuk menentukan calon di pemilu agar menang, namun tak memikirkan reformasi partai.

Padahal, ia menilai reformasi parpol adalah aspek penting dalam menghasilkan calon pemangku kebijakan di pemerintahan yang berkualitas. Begitu pun membangun citra partai di mata publik.

"Kita lihat bagaimana partai-partai sibuk untuk menentukan calon-calonnya. Itu penyelenggaraannya ketat sekali. Belum lagi bagaimana mereka mengurus kader di dahil. Jadi partai-partai sebetulnya disibukkan sendiri oleh medan politik, terus menerus, sehingga

untuk mereformasi diri itu enggak jalan-jalan," kata Kristiadi dalam diskusi virtual di YouTube Formappi, Senin (30/8).

"Berbagai macam kepentingan politik, membangun imperium kekuasaan itu ada semua. Tapi kompleksitasnya dalam membangun masalah fundamental saya kira dari situ [belum ada]," imbuh dia.

Kristiadi berharap terjadi reformasi partai yang dapat menentukan calon-calon politik masa depan yang berkualitas. Sebab, ia mengingatkan pemimpin rakyat memiliki tugas sangat mulia.

Ia bermaksud jangan sampai DPR hingga partai politik hanya dicalonkan berdasarkan potensi kemenangannya, namun bukan menurut kompetensi dan kualitas.

"Suara yang bentuknya orang cuma mencoblos itu betul-betul dikatakan suara Tuhan.

Karena jeritan, keinginan, keluhan rakyat, dititipkan ke mereka yang diganjar kekuatan martabat [pemimpin]. Ini harus jadi refleksi anggota DPR, DPRD, hingga pimpinan parpol, bukan sembarangan. Harus direnungkan," ujar Kristiadi. "Kehendak rakyat sangat ilahiah dan alkitabiah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kehendak rakyat, perlu orang yang punya panggilan dan kompetensi moral, pengetahuan, dan manajerial yang prima. Bagaimana memukanya? Dengan seleksi. Ya tidak mudah," tambah dia.

Di sisi lain, Kristiadi mengatakan, perbaikan yang dapat dilakukan saat ini adalah lebih banyak menarik generasi muda dalam rekrutmen dan menata sistem pemerintahan dalam parpol.

Adapun masyarakat diharapkan bisa terus memberikan kritik dari berbagai sarana demi

perbaikan parpol tersebut. Tak hanya itu, bentuk kritikan yang sedang marak saat ini lewat mural pun dimulainya bisa jadi momentum menyadarkan elite-elite, agar tetap mengedepankan hak-hak rakyat.

"Pakemnya good government dalam parpol. Tapi kalau parpol punya sumber kepentingan baik umum, pribadi, ya, jadi tidak sederhana. Oleh karena itu, menurut saya, kritik-kritik yang sekarang sudah terjadi, mural yang dihapus, EP3ES, dan lain-lain sebaiknya jadi momentum untuk menyadarkan kita semua," jelas dia. "Kalau bisa kita lakukan langkah sederhana semacam menyusun Omnibus Law penataan politik nasional. Untuk apa? Sekarang itu tumpang tindih pemerintah pusat, daerah, lembaga negara, lembaga kepresidenan, dan parlemen, itu masih banyak agenda, [kepentingan], tandasnya. (kum/js)

Bobby Beri Contoh Langsung Disiplin Hadapi Covid-19

Medan, MIMBAR - Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan, Wali Kota Medan Bobby Nasution langsung memberi contoh kepada masyarakat tentang disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat mengikutinya dan bersama-sama untuk mengatasi penyebaran virus Corona tersebut. Sebab, prokes merupakan salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Dengan penuh berani, Bobby Nasution turun langsung dan berkantor di Kecamatan Medan Helvetia yang merupakan satu dari lima kecamatan yang masuk zona merah karena angka kasus Covid-19 yang terjadi cukup tinggi. Selain ingin memberi contoh tentang disiplin melaksanakan prokes, Bobby Nasution juga ingin penangan Covid-19 yang dilakukan di wilayah tersebut maksimal, termasuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan melakukan isolasi lingkungan.

Bahkan, saat meninjau pelaksanaan isolasi lingkungan di Jalan Gaperta/Jalan Bakti Lingkungan VI, Kelurahan Tanjung Gusta, Bobby Nasution langsung mendatangi warga seraya memberikan masker bagi warga yang tidak memakai masker. Tak lupa orang nomor satu di Pemko Medan itu mengingatkan kepada

masyarakat akan pentingnya disiplin melaksanakan prokes. "Disiplin melaksanakan prokes merupakan salah satu kunci agar penyebaran Covid-19 di Kota Medan dapat diminimalisir," kata Bobby Nasution baru-baru ini.

Di samping itu Bobby Nasution juga terus membangun kolaborasi dengan semua pihak, termasuk unsur TNI dan Polri serta masyarakat agar upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan berjalan maksimal. Sebab, penanganan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan Pemko Medan sendiri, tapi harus didukung penuh semua pihak sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kerjasamanya. "Artinya, semua harus punya keinginan yang kuat untuk mengatasi pandemic Covid-19 ini," ungkapnya.

Keteladanan Bobby Nasution dalam memberikan contoh langsung kepada masyarakat tentang disiplin melaksanakan prokes mendapat respon positif. Selain mengikuti disiplin melaksanakan prokes, masyarakat juga mendukung penuh upaya yang dilakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Hasilnya pun cukup signifikan, kasus Covid-19 di zona merah pun drastis menurun. Indikasinya terlihat jelas di Kecamatan Medan Helvetia, sebelum Bobby Nasution berkantor di wilayah itu, angka kasus Covid-19 sebanyak 44 kasus perhari, tapi setelah sepekan menantu Presiden Joko Widodo itu berkantor, angka kasus Covid-19 menurun menjadi 9 kasus perhari.

Sikap Bobby nasution yang memberi contoh langsung tentang disiplin menghadapi Covid-19 sangat diapresiasi pengamat kesehatan Dr dr Delyuzar M Ked (PA) Sp PA (K).

Dikatakannya, apa yang dilakukan Bobby Nasution dapat menjadi contoh bagi warga dalam menekan kasus Covid-19. Di samping itu, harapnya, sikap itu harus juga diikuti dengan terus mendisiplinkan kafe-kafe maupun tempat-tempat yang selalu menjadi kerumunan lainnya sampai Kota Medan tidak masuk zona merah lagi, termasuk menjatuhkan sanksi denda bagi pelanggannya. "Yang dilakukan Pak Bobby Nasution dengan memberikan contoh langsung kepada masyarakat tentang disiplin melaksanakan prokes harus kita apresiasi. Itu (contoh) harus memang dimulai dari Pak Bobby. Kita berharap pun kalau berbicara di depan mik, tidak lagi menurunkan masker sehingga dapat dijadikan contoh. Setiap saat harus bermasker walaupun sedang berbicara, saya rasa itu keteladanan yang bagus dilakukan Pak Bobby," ungkap Delyuzar.

Meskipun kasus Covid-19 mulai turun di zona merah, kata Delyuzar, masih diperlukan banyak pembenahan. Salah satunya, ungkapnya, mendisiplinkan masyarakat yang paling penting. Sebab, edukasi yang diberikan terkadang tidak sepenuhnya sampai ke semua war-

ga. Sebagai contoh, jelas Delyuzar, penggunaan seatbelt (sabuk pengaman). Dikatakannya, dulu banyak orang yang tidak mau menggunakan seatbelt saat mengemudikan mobil. Namun sejak dikenakan denda, katanya, orang-orang mau memakainya. Oleh karenanya, sarannya, denda juga dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mentaati prokes.

Delyuzar selanjutnya mengungkapkan, upaya penurunan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan sudah dilakukan Bobby Nasution mulai dari hilir dengan menyiapkan tempat isolasi terpusat yang dilengkapi dengan fasilitas cukup baik seperti di ex Hotel Soechi Internasional, Gedung P4TK dan KM Bukit Raya. Namun penanganan dari hilir, lanjutnya, harus juga diikuti dengan penanganan dari hulu, salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk disiplin melaksanakan prokes. Untuk mengaktifkan hal itu, Delyuzar menyarankan agar Wali kota dapat melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk mengajak masyarakat ataupun jemaahnya agar disiplin melaksanakan prokes.

"Dengan contoh yang telah diberikan Pak Bobby Nasution langsung kepada masyarakat agar disiplin melaksanakan prokes dan masyarakat mengikutinya, saya yakin kasus penyebaran Covid-19 di Kota Medan dapat menurun," ujarnya optimis. (R/A-01)

KPK OTT...

Dari Halaman 1

Menurut sumber, dari operasi senyap itu, KPK mengamankan uang yang nilainya Rp 360 juta rupiah. Ada pun rasuah yang diduga menjerat keduanya adalah terkait dengan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo.

Hingga saat ini, kedua pejabat tersebut masih berstatus sebagai saksi. KPK memi-

liki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka, apakah menjadi tersangka atau tidak. Puput Tantriana telah menjabat sebagai Bupati Probolinggo sejak 2013. Saat ini, dia menjabat di periode kedua yakni 2018-2023.

Sedangkan Hasan merupakan politikus NasDem yang saat ini menempati posisi di DPR RI. Sebelum melangkah ke Senayan, Hasan merupakan Bupati

Probolinggo dua periode.

Ada pun yang berhasil melakukan OTT ini merupakan satuan tugas di bawah pimpinan Harun Al Rasyid. Dia merupakan salah satu kasatgas penyelidik yang dinonaktifkan karena tak lulus TWK.

Meski nonaktif, Harun disebut masih memberikan masukan dan arahan sehingga Satgas tersebut berhasil melakukan tangkap tangan. Plt juru bicara Ali Fikri

menbenarkan OTT tersebut. Dia mengatakan informasi lengkap terkait OTT itu akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Mengenai kasus selengkapannya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ucap Ali. "Tim masih bekerja, dan perkembangannya nanti kami pastikan akan kami sampaikan lebih lanjut," pungkas dia. (kum/js)

Habib Rizieq...

Dari Halaman 1

"Perkara nomor 210 juga dikuatkan dimana atas nama terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam perkara di Pengadilan Tinggi Nomor 210 Pidana Khusus tahun 2021 PT DKI, di pengadilan negeri dijatuhii pidana penjara selama 4 tahun terus oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan dengan putusan nomor

210 pidsu tahun 2021 PT DKI," beber pejabat humas PT DKI, Binsar Pamopo Pakpahan, di gedung PT DKI, Jalan Letjend Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (30/8).

PT DKI Jakarta juga menguatkan vonis menantu Habib Rizieq, Hanif Alatas, dan Dirut RS Ummi Andi Tatat. Keduanya juga tetap divonis 1 tahun penjara. Dalam sidang putusan tadi, kata Binsar, jaksa penuntut umum ataupun pengacara

Habib Rizieq tidak datang. Dia mengatakan pihaknya segera mengirimkan petikan putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Tentu saja perkara ini nanti akan disampaikan, diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada terdakwa maupun Penuntut Umum dan baik Terdakwa maupun Penuntut umum punya hak untuk melakukan upaya hukum, yaitu kalau keberatan dengan putusan ini

tentu akan mengadakan upaya hukum kasasi ke MA," kata Binsar.

Pada tingkat pertama Habib Rizieq divonis 4 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Ummi sehingga menimbulkan keonaran. Habib Rizieq bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rml/js)

Pengadilan Tipikor...

Dari Halaman 1

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, 3 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim, Panji Suroño yang sekaligus membacakan amar putusan pada sidang kasus suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, menyatakan terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana yang ditetapkan baik dalam dakwaan alternatif pertama ataupun dalam dakwaan alternatif kedua.

"Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum tersebut. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya," kata Ketua Ma-

jelis Hakim Panji Suroño, Senin (30/8).

Sejatinya, kasus suap ini terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 antara PT Asmin Koalindo Tujuh (PT AKT) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah. Di mana PT AKT merupakan anak perusahaan dari PT BLEM yang mempunyai Coal Contract of Work (CCOW) atau PKP2B dengan Kementerian ESDM, yang memberikan hak bagi PT AKT untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, seluas sekitar 40 ribu hektare.

Namun, Samin Tan menilai dirinya adalah korban dari Eni Maulani Saragih yang meminta uang dalam membiayai

pencalonan suaminya dalam Pilkada di Temanggung, Jateng. Kemudian menurut Majelis Hakim yang menjadi pertimbangan, Eni sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut SK no. 31 seterusnya tentang pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT AKT.

"Di mana yang punya kewenangan Menteri ESDM. Terdakwa korban pemerasan," kata Anggota Hakim Teguh Santosa saat membacakan pertimbangan.

Menurut Teguh, Samin Tan selaku pemberi gratifikasi belum diatur dalam UU Tipikor. Selama ini yang diatur adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak jujur karena telah menerima sesuatu dalam batas waktu 30 hari tidak melaporkan kepada KPL sesuai Pasal 12

B. Sehingga, karena Eni tidak melaporkan maka diancam dalam Pasal 12 B.

Sedangkan, pada Pasal 12 B bukan delik suap melainkan gratifikasi, maka menurut Teguh, sangat tidak mungkin sekali dalam hal gratifikasi itu diadakan pidana bagi yang memberikan.

"Tindakan pemberi gratifikasi belum diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang UU Tipikor," ujar Teguh.

Sebelumnya, Samin Tan dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidi enam bulan penjara oleh JPU KPK pada sidang penuntutan sebelumnya. Samin Tan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kum/js)

Lili Lakukan...

Dari Halaman 1

setelah yang bersangkutan selesai menjabat sebagai Plt Direktur PDAM Tirta Kualo," ucap Wakil Ketua Dewas KPK Albertina Ho.

Syahrial lantas bertanya pada Yudhi Gobel, yang saat ini menjabat Direktur PDAM Tirta Kualo, tetapi dijawab Yudhi Gobel bahwa keuangan saat ini sedang sulit. Namun Syahrial berkata sebaliknya kepada Lili.

"Syahrial memberitahukan kepada terperiksa melalui telepon dengan mengatakan, 'Sudah Bu segera akan dibayarkan uang jasa pengabdian adik Ibu', yang dijawab terperiksa, 'Terima kasih,'" ucapnya.

Setelah itu, Lili meminta Ruri menyurati Direktur PDAM Tirta Kualo untuk menagih uang itu. Tak hanya itu, Lili juga meminta Ruri memberikan tembusan surat itu ke KPK.

Albertina mengatakan bahwa sebenarnya keuangan PDAM Tirta Kualo sedang tidak baik tetapi akhirnya uang pengabdian itu tetap dibayarkan ke Ruri dengan

dicicil sebanyak 3 kali. Total keseluruhan uang yang diberikan yaitu Rp 53.334.640.

"Majelis berpendapat dibayarkannya uang jasa pengabdian tersebut setidaknya adalah karena pengaruh terperiksa yang meminta bantuan kepada saksi M Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai," ucap Albertina.

URUSAN PERKARA SYAHRIAL
Padahal Syahrial sebenarnya pernah diperiksa KPK pada September 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun Lili mengaku tidak tahu tentang status Syahrial sebagai pihak berperkara di KPK.

Baru beberapa bulan kemudian usai urusan penanganan uang pengabdian Ruri yaitu tepatnya Juli 2020, Lili menelepon Syahrial. Sebab, Lili membaca berkas perkara Syahrial.

"Terperiksa menghubungi saksi M Syahrial melalui telepon dengan mengatakan, 'Ini ada namamu di mejaku, bikin malu. Rp 200 juta masih kau ambil,' dan dijawab oleh saksi M Syahrial, 'Itu perkara lama Bu, tolong dibantulah', lalu terper-

iksa menjawab 'Banyak berdoalah kau'," kata Albertina.

Namun dalam persidangan etik di Dewas, Lili tidak menjelaskan mengenai berkas yang dimaksudnya itu. Meski demikian, Dewas KPK tetap berpendapat apa yang dilakukan Lili merupakan perbuatan yang melanggar kode etik.

Lili dinyatakan Dewas KPK terbukti menyalahgunakan pengaruhnya sebagai Pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi serta melakukan hubungan langsung dengan pihak yang berperkara di KPK. Lili pun divonis melanggar etik berat dengan sanksi pemotongan gaji.

"Menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Pangga-

bean saat konferensi pers.

Lili pun disanksi pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan. Lili sendiri mengaku menerima vonis ini.

Usai konferensi pers itu, Tumpak selaku Ketua Dewas KPK menekankan soal perbuatan berhubungan dengan orang berperkara di KPK merupakan perbuatan yang sangat berpengaruh pada nilai integritas. Tumpak pun berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

"Perlu kami sampaikan bahwa perbuatan berhubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK itu adalah nilai-nilai integritas yang betul-betul esensial bagi KPK sejak KPK berdiri dulu. Oleh karena itu, itu tetap harus kita pertahankan dalam rangka menjaga marwah KPK yang selama ini dikenal punya integritas yang tinggi," kata Tumpak.

"Jadi harapan kami tentunya setelah ada putusan-putusan seperti begini, teman-teman rekan-rekan insan KPK, baik pimpinan maupun Dewas maupun seluruh insan KPK, ini jangan melakukan perbuatan seperti ini lagi," imbuhnya. (dtc/js)

Syahrial Dituntut..

Dari Halaman 1

Sementara dalam menuntut terdakwa, yang menjadi pertimbangan Budi, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum," tutur JPU Budi.

Usai mendengarkan pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis selanjutnya menunda persidangan dan di buka kembali pekan depan dalam agenda pembelaan (pledoi). (A-08)

Kasus Covid...

Dari Halaman 1

Hasil ini diperoleh dari 125.423 spesimen atau 78.055 orang yang diperiksa, menurut data kemarin 92.531 orang diperiksa.

Positivity rate orang harian kini menyentuh angka 6,96%. Sementara total kasus konfirmasi kini menjadi 4.079.267 kasus.

Penambahan kasus sembuh hari ini juga tercatat lebih tinggi dari kasus konfirmasi yaitu 19.398 kasus. Total kasus sembuh seluruhnya mencapai 3.743.716 kasus.

Sementara untuk kasus meninggal bertambah 568 kasus, naik sedikit dari hari sebelumnya 551 orang. Sehingga total seluruh kasus meninggal sebanyak 132.491 kasus.

Kasus aktif RI juga terus menurun. Hari ini penurunan tercatat sebanyak 14.530 kasus. Kini, total kasus aktif yang tersebar di Indonesia mencapai 203.060 kasus. (kum/js)

Kasus Covid...

Dari Halaman 1

Berdasarkan data per 30 Agustus 2021, kasus konfirmasi positif bertambah 350 kasus sehingga kasus kumulatif konfirmasi positif di Sumut menjadi 95.512.

Berbeda dengan kasus pada beberapa waktu lalu yang mencapai 1.000-an kasus per hari. Kasus konfirmasi sudah berada di bawah angka 1.000 mulai pada 28 Agustus bertambah 741 kasus dan 29 Agustus bertambah 653 kasus.

Sementara itu, kesembuhan terus meningkat pesat. Per 30 Agustus, kasus sembuh bertambah 1.285 orang. Sehingga total kumulatif kasus kesembuhan kini mencapai 71.937 orang. Hingga kini kasus aktif di Sumut sebanyak 21.225 orang. "Ini merupakan hal yang baik, namun kita akan terus berupaya mempertahankan kondisi seperti ini hingga kasus benar-benar melandai terus," kata Irman, yang juga Kepala Dinas Kominfo Sumut.

Irman menyampaikan, Satgas akan terus mengajak masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi. Jika kehidupan ingin normal seperti semula, hal tersebut mestilah dilakukan.

"Walaupun melandai, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan, yang paling mudah itu pakai masker, masker adalah yang utama," ujar Irman.

Irman juga mengajak tokoh masyarakat, agama, dan tokoh terkemuka lain terus mengajak masyarakat untuk mengimbau penerapan protokol kesehatan.

"Kami tidak bisa melakukan ini sendiri, perlu dukungan yang besar dari banyak pihak seperti tokoh masyarakat, agama dan lain lain," kata Irman. (rel/js)



DPR Masih...

Dari Halaman 1

Imbauan Ketua DPR RI Puan Maharani, DPR harus belajar mendengarkan aspirasi rakyat adalah sebuah fakta bahwa selama ini DPR tidak punya kepintaran mendengarkan aspirasi rakyat. Padahal mereka bisa duduk di legislatif karena dipilih oleh rakyat.

Di usia 76 tahun masih belajar mendengarkan aspirasi rakyat sungguh sangat memalukan. Sebab usia 76 tahun diibaratkan dengan usia manusia sudah cukup tua untuk belajar. Pepatah lama mengatakan, belajar di usia muda ibarat mengukir di atas batu, belajar di waktu tua ibarat mengukir di atas air.

Mengukir di atas batu maka sesuatu itu akan terukir permanen dalam harti kita, karena pikiran mereka yang masih muda itu masih bersih, belum terlalu banyak beban fikiran atau beban kehidupan.

Belajar setelah dewasa pikiran kita akan sulit sekali mencerna ilmu pengetahuan, karena pikiran orang dewasa sudah terlalu banyak beban fikiran atau beban kehidupan. Setiap mencoba mengingat pelajaran maka akan mudah juga untuk lupa.

Berdasarkan pribahasa tersebut di atas maka akan sulit bagi anggota dewan untuk bisa menampung aspirasi rakyat dengan baik, karena di usianya yang sudah tua, mungkin tak kepikir lagi tentang rakyat, mereka sudah cepat lupa, mereka lebih memikirkan diri sendiri atau kelompok mereka.

Apa yang dirasakan oleh rakyat adalah suatu kekecewaan atas keberadaan orang-orang yang duduk di lembaga legislatif mengatas namakan rakyat tetapi tidak bisa menangkap dan menyalurkan aspirasi rakyat. Karenanya selama ini rakyat merasa pesimis menyampaikan aspirasinya ke lembaga legislatif itu.



Wali Kota Medan, Bobby Nasution menerima kunjungan kerja Wali Kota Bengkulu, H. Helmi Hasan, Senin (30/8) di Ruang Rapat I, Kantor Wali Kota. (Foto Mimbar/Ist)

Bobby Terima Kunjungan Wali Kota Bengkulu

Medan, MIMBAR - Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima kunjungan kerja Wali Kota Bengkulu H Helmi Hasan di Ruang Rapat I, Kantor Wali Kota, Senin (30/8).

Dalam pertemuan itu Bobby memaparkan tentang lima program prioritas Pemko Medan dengan dua supporting utama, yakni reformasi birokrasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta tentang penanganan pandemi Covid-19 di Medan, juga program beasiswa dan masuk PTN tanpa testing bagi siswa berprestasi.

Bobby menguraikan, kelima program prioritas Pemko Medan adalah peningkatan pelayanan kesehatan, terutama penanganan Covid-19, penanganan banjir, kebersihan, infrastruktur, dan pembenahan kawasan kota lama dengan mengeksplorasi keberagaman dan kuliner serta memberdayakan UMKM.

Terkait masalah pendidikan, Bobby mengaku, Pemko Medan memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. "Para juara MTQ yang masih pelajar kita beri beasiswa. Dan mereka juga bisa masuk PTN melalui jalur khusus. Terkait ini Pemko Medan telah menjalin kerja sama dengan UNSU dan USU," ungkap Bobby, seraya menegaskan hal tersebut juga berlaku bagi siswa yang memiliki prestasi di bidang olahraga.

Selanjutnya, Wali Kota Bengkulu H. Helmi Hasan yang memaparkan visi Pemko Bengkulu, antara lain, mewujudkan Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat. Sedangkan misinya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, mewujudkan masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia, membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif.

Dia juga mengatakan, Pemko Bengkulu juga melaksanakan Gerakan Peduli Yatim dan Gerakan Peduli Siswa.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat. Baik Bobby Nasution maupun Helmi Hasan saling mendengarkan dengan serius program masing-masing Pemko. Pertemuan ini diakhiri dengan saling memberi cendera mata antara Bobby Nasution dan Helmi Hasan.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, Sekda Medan Wirya Alrahman, Kepala Bappeda Medan Benny Iskandar, Plt Asisten Pemerintahan Setda Medan M. Sofyan, dan Sekda Bengkulu Arif Gunadi. (R/A-01)

RS USU Vaksinasi 50 Orang Ibu Hamil

Medan, MIMBAR - Dalam rangka sukseskan vaksinasi nasional, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sumatera Utara (RS USU) menggelar vaksinasi terhadap ibu hamil di salah satu ruangan pelayanan medis RS USU, kemarin. Terlihat ibu hamil sebagai peserta vaksin antri menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker.

Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RS USU dr Muhammad Rizki Yaznil M.Ked, SpOG(K), menjelaskan kegiatan tersebut merupakan upaya RS USU memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Pelaksanaan vaksin tersebut dilaksanakan sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

"Pelaksanaan vaksin bagi ibu hamil ini merupakan yang pertama di Medan. Kita ingin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, disamping membantu pemerintah menyelesaikan vaksinasi nasional. Kita mulai vaksin untuk ibu hamil setelah adanya arahan dari kementerian (kesehatan) dan POGI," sebut Yaznil.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/1/2007/2021 tentang Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil dan Penyusuan Skrinnging dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Surat Edaran tersebut sesuai dengan rekomendasi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).

Lebih jauh Yaznil memaparkan, vaksin bagi ibu hamil secara rutin akan dilaksanakan di RS USU. RS USU akan membuka layanan vaksin bagi ibu hamil dua sampai tiga kali dalam seminggu. "Kita laksanakan secara rutin sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Terkadang stok vaksin belum masuk ke kita makanya vaksinasi jadi tertendat. Kita berharap pemerintah dapat fokus untuk ketersediaan vaksin ini," ujarnya.

dr. Vita Camellia M.Ked., Sp.KJ yang turut menanggungjawab pelaksanaan tersebut turut menyampaikan hal senada. Disampaikan, antusias ibu hamil untuk vaksin sangat tinggi sehingga perlu stok vaksin yang cukup. "Kita melihat antusias yang akan divaksin ini sangat tinggi ya. Sehingga kita berharap agar stok nya tetap tersedia. Melalui vaksin ini juga saya berharap ibu hamil lain termotivasi, karena ada informasi banyak ibu hamil yang masih takut untuk divaksin," sebut Vita.

Vaksinasi pada hari itu dijadwalkan akan memberikan dosis pertama kepada 50 orang ibu hamil. Menggunakan vaksin CoronaVac (Sinovac), ibu hamil yang diperbolehkan ikut vaksin yang telah memiliki usia kehamilan diatas 13 minggu.

"Ibu hamil ini kan populasi rentan, jadi perlu untuk divaksin. Sebelumnya kita cukup kebingungan, di satu sisi ibu hamil rentan, tapi tidak bisa makan obat sembarangan. Terutama yang usia kehamilan di bawah 12 minggu, karena masih terjadi pembentukan organ janin," jelas Yaznil.

la pun mengajak ibu hamil lainnya untuk ikut vaksin. RS USU telah menyediakan tautan pendaftaran yang dapat diakses secara terbuka. Kegiatan vaksin dimulai pukul satu siang hingga selesai, dengan kuota 50 orang per hari. (A-09)



Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

Medan, MIMBAR - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Bidang/Komisariat Informatika dan Komunikasi menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengambil tema 'Pembekalan Ulama di Era Informasi Digital' yang dilaksanakan di aula MUI Jalan Majelis Ulama Nomor 3 Medan selama beberapa hari.

Ketua Bidang Informatika dan Komunika-

DPRD: Perda Keolahragaan Jangan Sekedar Hiasan Dokumen

Medan, MIMBAR - Anggota DPRD Medan yang tergabung di Panitia Khusus (Pansus) Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Keolahragaan mengawali pembahasan draf Ranperda yang diajukan Pemko Medan. Pansus mengingatkan Pemko Medan agar Perda nantinya benar benar diterapkan sehingga tidak sekedar dokumen.

"Kita harapkan Perda ini nantinya benar benar dijalankan, jangan sekedar hiasan. Tetapi harus mendorong peningkatan pembinaan atlet berprestasi," ujar Ketua Pansus Surianto.

Rapat Pansus Ranperda Pemko Medan Keolahragaan berlangsung di ruang banmus gedung DPRD Medan, Senin (30/8/2021) dipimpin Ketua Pansus Surianto didampingi anggota Irwansyah, Wont Cun Sen, David Roni Ganda Sinaga dan Afif Abdillah. Hadir juga Kabid Dinas Pemuda Olahraga Kota Medan Irfan Abdillah didampingi Ismail Marzuki, Ika, Josua Sitompul dan staf lainnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Surianto mempertanyakan apa tujuan pembuatan Perda. Karena banyak

Perda yang tidak maksimal dijalankan.

Sama halnya dengan anggota Pansus Wong Cun Sen menyampaikan Perda Keolahragaan dinilai sangat penting guna kemajuan olahraga di Medan. "Fasilitas Olahraga di Medan harus menjadi perhatian Pemko Medan," sebut Wong Cun Sen.

Ditambahkan Wong Cun Sen asal politisi PDIP itu, melalui pembinaan atlet diharapkan dapat membawa nama Kota Medan hingga Internasional. Maka untuk itu, dalam pembahasan selanjutnya supaya dilibatkan lembaga lain yang berkaitan olahraga seperti KONI. "Pembahasan perlu dilakukan secara aktual," tandas Wong.

Sebelumnya mewakili Dinas Pemuda Olah-

raga Irfan Abdillah menyampaikan adapun tujuan diajukan pembuatan Perda untuk memajukan dunia olahraga di Kota Medan. Selama ini karena belum adanya Perda sebagai payung hukum, Pemko Medan sering terkendala melakukan kebijakan terkait olahraga sehingga banyak atlet yang belum terakomodir.

Ditambahkan Irfan Abdillah, selama ini akibat belum adanya Perda, maka Pemko Medan tidak dapat mendapat bantuan. Sehingga menjadi kendala dalam peningkatan atlet berprestasi. "Maka Perda sangat penting sebagai dasar melakukan pembinaan. Apalagi pada PON Tahun 2024 nanti sudah dapat mempersiapkan dengan adanya aturan ini," terang Irfan.(A-06)



Rapat Pansus Ranperda Pemko Medan Keolahragaan berlangsung di ruang banmus gedung DPRD Medan.(Mimbar/ist)

Pemko Raih Penghargaan, BKN Izin Gelar Ujian CPNS dan PPPK Guru

Medan, MIMBAR - Pemerintah Kota (Pemko) Medan meraih dua penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021 di dua kategori berbeda. Di mana Pemko Medan menjadi juara kedua atas Capaian Dalam Komitmen Pengawasan dan Pengendalian untuk Pemerintah Kota Tipe A dan menjadi juara kedua juga atas Capaian Dalam Implementasi Penilaian Kinerja untuk Pemerintah Kota Tipe A.

Kedua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Aidu Tauhid kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution di Balai Medan, Senin (30/8).

"Proses penilaian sudah dilakukan dalam satu tahun, dan kota Medan meraih dua penghargaan untuk dua kategori yang berbeda," kata Aidu Tauhid.

Setelah memberi penghargaan, Aidu meminta izin kepada Wali Kota Medan untuk menyelenggarakan ujian

tes CPNS dan PPPK di Kota Medan.

"Dalam waktu dekat kami akan menggelar tes kompetensi CPNS dan PPPK guru dan non guru di Kota Medan, karena itu kami meminta izin kepada Bapak Wali Kota Medan untuk menyelenggarakannya di Kota Medan," tuturnya.

Usai menerima kedua penghargaan tersebut, Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan BKN kepada Pemko Medan.

Menurut Bobby, penghargaan ini akan menjadi semangat bagi Pemko Medan dalam meningkatkan kinerja kepegawaian.

"Saya ucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan kepada Pemko Medan, saya dan OPD lainnya akan terus meningkatkan kinerja kepegawaian di lingkungan Pemko Medan," ucap Nasution.

la juga menyampaikan masukan kepada BKN untuk dapat memberi-

kan pelatihan kepada aparatur Pemko Medan guna meningkatkan kompetensi di bidang masing-masing.

"Saya berharap semakin banyak pelatihan yang digelar untuk aparatur Pemko Medan untuk menunjang kompetensi ASN kita," imbuhnya.

Sedangkan terkait dengan pe-

nyelenggaraan tes CPNS dan PPPK yang akan digelar di Kota Medan, Wali Kota mengungkapkan siap mendukung penyelenggaraan ujian tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. "Untuk ujian SKD CPNS dan PPPK kami akan mendukungnya," tandasnya.(r/A-01)



Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, Aidu Tauhid menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution di Kantor Walikota Medan, Senin (30/08/2021).

Rakorda Baznas se-Sumut, Gubernur Minta Dana ZIS dapat Menggerakkan Ekonomi Umat

Medan, MIMBAR - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumut untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada umat tidak hanya barang konsumtif, melainkan harus juga bersifat produktif, yang dapat meng-

gerakkan ekonomi umat.

Hal ini disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-Sumut tahun 2021 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman

Nomor 41 Medan, Senin (30/8).

Hadiri di antaranya Ketua Baznas RI KH Noor Achmad, Ketua Baznas Sumut Amanyah Nasution, Ketua MUI Sumut Maratus Simanjuntak, serta para Ketua Baznas Kabupaten/Kota se-Sumut.

"Kedepan saya meminta untuk menyalurkan bantuan pada penerima zakat dan lainnya sebaiknya tidak konsumtif, akan tetapi lebih pada bantuan yang produktif, agar dapat menggerakkan ekonomi umat," ucap Edy Rahmayadi.

Selain itu, Edy juga mengingatkan pada semua pengurus Baznas untuk bekerja dengan baik, menjalankan amanah penyaluran zakat ini sesuai yang berhak menerimanya.

"Selamat melaksanakan rapat ini, semoga dapat melahirkan program yang bermanfaat," katanya.

Ketua Baznas RI KH Noor Achmad dalam arahnya mengingatkan pada seluruh pengurus Baznas Sumut pada visi dan misi Baznas dalam pengelolaan dana umat,

yakni menyejahterakan umat. Yang utama dijelaskannya, Baznas Sumut harus segera melakukan penguatan SDM, sarana dan prasarana serta jaringan.

Dengan terbentuknya penguatan ini, menurut Noor Achmad, diharapkan segala program dalam menjalankan amanah ini dapat berjalan dengan baik dan akuntabilitas.

"Di sini saya lihat masih ditemukannya Baznas daerah yang belum memiliki kantor. Dengan adanya kantor ini nantinya diharapkan segala administrasi dan data masyarakat di daerah tersebut dapat tertata dengan baik," ujarnya.

Sementara Ketua Baznas Sumut Amanyah Nasution melaporkan, Baznas Sumut telah membangun kepercayaan masyarakat Sumut dalam pengelolaan dana ZIS melalui edukasi dan sosialisasi pada organisasi perangkat daerah (OPD) instansi vertikal Pemprov Sumut, BUMD serta bekerja sama dengan MUI. (gs)



Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menghadiri sekaligus membuka Rakorda Baznas se-Sumut tahun 2021 yang diselenggarakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (30/8). (Foto Mimbar/IST)

MUI Sumut Gelar Pekan Diskusi Digital

Medan, MIMBAR - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Bidang/Komisariat Informatika dan Komunikasi menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengambil tema 'Pembekalan Ulama di Era Informasi Digital' yang dilaksanakan di aula MUI Jalan Majelis Ulama Nomor 3 Medan selama beberapa hari.

Ketua Bidang Informatika dan Komunika-

si MUI Sumut Dr.H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum ketika membuka kegiatan itu, Senin (30/8/2021) menjelaskan, FGD menghadirkan pakar informasi teknologi yakni para admin dibidang pemberitaan digital dari berbagai media yang ada di Kota Medan.

Akmal didampingi Sekretaris Dr. Wirman Tobing, MA menjelaskan kegiatan FGD ini digelar sebagai upaya mendiskusikan apa dan bagaimana cakupan yang sangat dipahami oleh para ulama, sekaitan dengan era digital yang berkembang pesat.

Intinya, kata Akmaluddin, dalam kegiatan ini bertujuan untuk explore ide tentang pembekalan ulama era informasi digital. Pem-

bekalan ulama terkait pengetahuan, sensitisasi dan keterampilan terkait pemanfaatan teknologi informasi digital. Identifikasi konten, aplikasi, metode dan strategi penggunaan medsos untuk berdakwah.

Ads

Dalam diskusi dengan fasilitator Rustam MA, peserta memberikan gagasan dalam menggunakan media sosial antaranya, hendaknya bisa memfilter berita yang dibaca atau informasi yang diterima, agar dipastikan kebenarannya bisa mengecek kebenaran di www.turnbackhoax.id.

Selain itu, sangat perlu mempelajari bagaimana cara untuk membuat konten se-

cara khusus di dunia maya, agar bisa menjadi tempat berdakwah.

Selain itu dengan memahami teknologi, maka akan terkesan ulama tersebut sudah masuk ranah kekinian atau sejalan dengan kaum milenial. Sehingga ulama tersebut bukan saja bergerak konvensional tapi juga bergerak secara digital.

Akmal menjelaskan rangkaian acara diskusi juga berlanjut pada Selasa (31/8/2021) dengan menghadirkan akademisi, serta Rabu (1/9/2021) untuk para wartawan/reporter dan penggiat media sosial dan pada sesi terakhir, Kamis (2/9/2021) dengan peserta para ulama. (gs)